

Wacana Elit Politik: antara Eufemisme dan Sarkasme

Fahmi Gunawan

Dosen Jurusan Tarbiyah Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Artikel ini membahas wacana elit politik: antara eufemisme dan sarkasme dengan menggunakan pendekatan kebudayaan. Yang dimaksud bahasa elit politik adalah bahasa yang digunakan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif ditemukan bahwa bahasa elit politik terbagi dua, yaitu eufemisme dan sarkasme. Eufemisme adalah bahasa yang lebih halus sebagai pengganti dari bahasa yang dirasakan kasar sehingga dapat mengaburkan makna, sementara sarkasme adalah bahasa yang digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang pahit dan kasar. Penggunaan kata-kata ini dilakukan untuk mengejek, mencemooh, dan menyindir yang diduga akan menyakiti hati orang lain dan hal ini melanggar kesantunan berbahasa. Penggunaan bahasa sarkasme ini merefleksikan budaya miskin bahasa atau (linguistic poverty) di kalangan para elit politik.

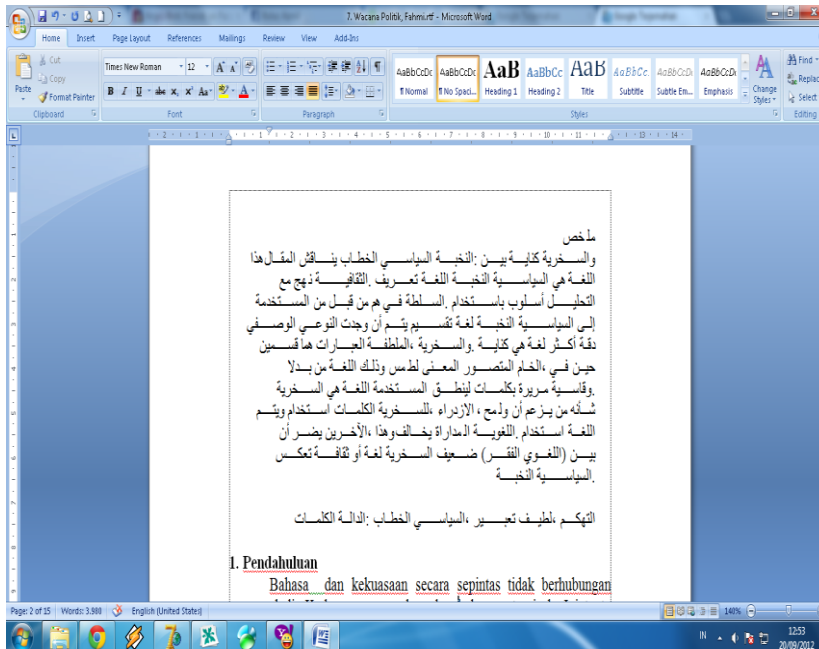
Kata-Kata Kunci: *Wacana Politik, Eufemisme, Sarkasme*

Elite Political Discourse: between Euphemism and Sarcasm

By Fahmi Gunawan

This article aims to discuss elite political discourse: between euphemism and sarcasm. In discussing the content, this article uses cultural approach. What does it mean by elite political language in this study is the language of the leaders which uses euphemism and sarcasm. Euphemism is a kind of soft language which is used to change the rough meaning of the language, while sarcasm is a kind of language which is used to express rudeness and roughness. These kind languages are used to insult, humiliate, and tease people. Such languages are considered violating the politeness of using language because people will be annoyed and feel bad about them. The use of such languages, indeed, reflects the linguistic poverty of the elite politicians.

Key words: Political discourse, euphemism, sarcasm



A. Pendahuluan

Bahasa dan kekuasaan secara sepintas tidak berhubungan sama sekali. Keduanya merupakan dua hal yang terpisah. Ini tentu tidak salah jika bahasa dimaknai secara konvensional. Jika bahasa dimaknai seperti itu, persoalan bahasa dan kekuasaan tidak akan mungkin bertemu, karena bahasa tergolong wilayah kajian ilmu linguistik, sedangkan kekuasaan tergolong wilayah kajian ilmu politik.¹

Namun, perjumpaan antara bahasa dan kekuasaan dimulai setelah para kaum post-strukturalisme, seperti Jürgen Habermas, Jean Baudrillard, Antonio Gramsci, Michel Foucault dan lain-lain menegaskan betapa pentingnya relasi antara bahasa dan kekuasaan. Bahkan, Jean Baudrillard menegaskan bahwa *"The real monopoly is never that of technical means, but that of speech"*. Sejak saat itu, diskusi tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan semakin semarak. Sebelumnya, kehadiran karya Fairclough *"Language and Power"*, Benedict Anderson *"Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia"*, Pierre Bourdieu *"Language and Symbolic*

¹ Rahardjo, Mudjia, 2010, *Bahasa dan Kekuasaan*, <http://mudjiarahardjo.com>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2012.

Power” juga telah membuka ruang diskusi ilmiah tentang relasi bahasa dan kekuasaan.²

Hubungan bahasa dengan kekuasaan berada pada ranah apa yang baik dan apa yang buruk serta apa yang santun dan apa yang kurang santun dalam berbahasa. Hal ini menjadi penting karena bahasa merupakan salah satu aspek kebudayaan. Ini juga berarti bahwa kebudayaan suatu masyarakat tercermin pada nilai-nilai kebahasaan mereka. Nilai-nilai kebahasaan dapat berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Derek Walcott pemenang hadiah nobel kesusasteraan 1992 mengatakan bahwa bahasa adalah titik pusat kebudayaan, dan kebudayaan akan menjadi amburadul bila masyarakat mulai kehilangan hormat terhadap bahasanya.³

Ketika suatu masyarakat telah kehilangan hormat terhadap bahasanya, maka akan muncul apa yang disebut dengan budaya kekerasan. Maksudnya, dalam berbahasa, masyarakat sudah tidak memperhatikan etika komunikasi. Sopan santun yang selama ini dijunjung tinggi perlahan-lahan mulai memudar. Hal ini senada dengan pendapat Bahtiar Ali yang mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang keras dan tidak santun oleh para elit politik dan pemegang kekuasaan merupakan salah faktor mengapa masyarakat Indonesia menganut budaya kekerasan. Hal ini dikarenakan dinamika bahasa sangat bergantung pada komando bahasa yang dipegang oleh elit politik, para pemegang kekuasaan. Bahkan, Hasanuddin WS, seorang pakar bahasa dan sastra, juga mengungkapkan bahwa cara berbahasa masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, jika pemimpinnya mempunyai rasa bahasa yang kuat, maka masyarakatnya pun akan ikut punya rasa bahasa. Begitu pula sebaliknya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa yang dilakukan oleh para elit politik dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini terfokus pada (1) bagaimana perwujudan bahasa yang digunakan para elit politik, dan (2) budaya apa yang dapat terefleksi dari penggunaan bahasa para elit politik. Yang dimaksud elit politik dalam tulisan ini adalah para pemegang kekuasaan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional.

² Ibid, p. 2

³ Jatmiko, Teguh, 1995, “*Penyair Harap Minggir*” Jawa Pos, 29 Oktober.

⁴ Hasanuddin, WS, Mendekatkan Masyarakat dengan Bahasanya, <http://padangtoday.com>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2012

B. Teori Bahasa Politik dan Politik Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Semua makhluk sosial, mulai semut, ikan paus dan sapi berkomunikasi satu sama lain, namun hanya manusia yang mampu menciptakan bahasa yang tidak hanya berupa bunyi atau sinyal-sinyal, tetapi juga untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Bukan hanya itu, bahasa juga dapat dimanipulasi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingannya.⁵

Kita dapat melihat bagaimana para pejabat Negara dan politisi pandai berpidato dan menghipnotis pendengarnya dengan janji-janji dan retorika. Yang keluar dari mulut mereka adalah susunan kata-kata yang membentuk kalimat indah, dengan intonasi dan nada suara yang membius sehingga pendengarnya mau bertindak sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Politisi sangat menyadari kekuatan bahasa dalam mempengaruhi pikiran manusia. Mereka menganggap bahwa bahasa dapat dijadikan alat politik atau alat kontrol sosial.

Bahasa sebagai alat politik dapat dijadikan alat atau lahan untuk mencari simpati dan dukungan rakyat dan dapat juga dijadikan propaganda atau perang wacana para politisi.⁶ Bahasa untuk mencari simpati dan dukungan rakyat disebut eufemisme, sementara bahasa untuk melancarkan propaganda dan perang wacana yang sarat kebencian, pembunuhan karakter, penelanjangan kejelekan orang lain disebut sarkasme.⁷ Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar. Penggunaan gaya bahasa ini dimaksudkan untuk membuat segala sesuatu menjadi tampak berkesan positif, berkesan lebih baik ketimbang realitas senyatanya.⁸ Salah satu penggunaan gaya bahasa eufemisme dapat dilihat dari hasil sidang paripurna anggota DPR pasal 7 ayat 6 dan 6A Undang-Undang APBN Perubahan 2012 yang menyebutkan bahwa,

⁵ Santoso, Anang, 2003, *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*, penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta, p. 32

⁶ Sultan, 2009, Bahasa Pencitraan dalam Wacana Iklan Kampanye Calon Anggota Legislatif 2009, *Jurnal Wacana Kritis*, Vol. 14, No. 2 Juli

⁷ Trianto, Agus, 2008, Telaah Sarkasme Judul Berita Surat Kabar, *Makalah Disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa Indonesia di Jakarta*, 28 Oktober-1 November 2008.

⁸ Ibid, p. 2

(1) Tidak ada kenaikan harga BBM, namun memberikan ruang bagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika deviasi ICP mencapai 15% dalam waktu 6 bulan.⁹

Munculnya pernyataan di atas membuat harga bahan bakar minyak tidak naik pada 1 April 2012. Namun demikian, bahasa yang digunakan dalam undang-undang APBN Perubahan itu mengandung eufemisme. Klausa *tidak ada kenaikan harga BBM...namun* tergolong klausa deklaratif positif. Maksudnya, klausa pernyataan yang tidak mengandung negasi meskipun di dalamnya terdapat kata *tidak*. Penggunaan negasi *tidak* yang diikuti pengecualian *namun* digolongkan dalam klausa deklaratif positif, bukan deklaratif negatif. Ini juga berarti bahwa klausa pada data (1) sederajat dengan klausa, *kenaikan harga bahan bakar minyak...*

Itulah sebabnya mengapa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yusril Ihza Mahendra, salah satu pakar hukum, menentang keputusan itu. Bahkan, Yusril berencana mengajukan uji formal dan materil terhadap keberadaan pasal 7 ayat 6 dan 6A itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril memandang bahwa pasal itu telah *menabrak* Pasal 33 UUD 1945 seperti ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain mengabaikan kedaulatan rakyat, dalam menetapkan APBN, juga mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan. Kepastian yang dimaksud ahli hukum tata negara ini adalah, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya, seperti fluktuasi harga ICP. Ini seperti menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar. Ini berarti kedaulatan negara akan berkurang.¹⁰

Sarkasme secara etimologi berasal dari bahasa perancis sarkasmos atau sarkazo. Sarkazo adalah daging yang tertusuk atau hati yang tertusuk. Jadi, sarkazo berarti sesuatu yang dihujamkan dan menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Dalam perkembangannya, kata sarkazo lebih dikenal dengan kata sarx-sarkos yang artinya menyindir dengan tajam atau sindiran yang tajam.¹¹ Dengan demikian, bahasa sarkasme adalah bahasa kasar yang diduga akan menyakiti hati orang lain atau pendengarnya.

⁹ Linda, S, Sitonga, 2012, "Harga BBM: SBY Ingatkan Ada Konsekuensi dari Keputusan DPR," *Kompas*, 1 April 2012

¹⁰ www.tubasmedia.com/berita/yusril-pasal-7-ayat-6a-tabrak-uud-45/, diunduh pada tanggal 1 April 2012

¹¹ Webster's World Encyclopedia. 2000. Program CD.

Inilah yang disebut dengan politik bahasa. Eufemisme atau penghalusan bahasa ternyata hanya berlaku untuk tindakan dan kebijakan penguasa. Untuk masyarakat yang ingin mengkritisi kebijakan penguasa digunakan bahasa sarkasme. Seringkali, masyarakat yang ingin mengkoreksi tindakan ketidakadilan penguasa malah dianggap melakukan tindakan subversif atau tindakan maker yang harus diberantas.

C. Perwujudan Bahasa Elit Politik

Para elit politik kita cenderung menggunakan bahasa yang sangat paradoks. Di satu sisi, mereka menggunakan bahasa eufemisme yang sangat mengedepankan kesopanan, dan di sisi lain, mereka menggunakan bahasa sarkasme yang jauh dari nilai kesopanan. Ini terjadi karena apa yang dianggap sopan oleh seseorang, belum tentu dianggap sopan oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Bahasa yang dianggap kurang sopan belum tentu dianggap sopan oleh orang lain. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai eufemisme dan sarkasme.

1 Eufemisme

Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar.¹² Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut.

(2) Dimana 'tempat kencing'nya?"

(3) Dimana 'kamar kecil'nya?"

Dalam bahasa sehari-hari, frase "*tempat kencing*" pada data (2) juga disebut WC. Frase ini tidak cocok digunakan untuk percakapan yang sopan. Frase "kamar kecil" pada (3) dapat menggantikannya karena dianggap jauh lebih sopan. Jadi, dalam eufemisme terjadi pergantian nilai rasa dalam percakapan dari kurang sopan menjadi lebih sopan.

Eufemisme merupakan acuan yang berupa ungkapan yang tidak menyinggung perasaan atau ungkapan halus untuk menggantikan acuan yang dirasakan menghina atau tidak menyenangkan. Intinya, mempergunakan kata-kata dengan arti baik. Eufemisme juga sering diartikan sebagai ungkapan yang bersifat tidak berterus terang. Eufemisme atau juga pseudo eufemisme menjadi motif dorongan di belakang perkembangan peyorasi. Eufemisme berlatar belakang sikap manusiawi karena dia berusaha untuk menghindari agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang

¹² Rahardi, Kunjana, 2010, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Penerbit Airlangga, Jakarta, p. 23

lain. Seandainya tidak ada eufemisme, mungkin akan terjadi depresi makna atau perendahan makna. Namun di balik semua itu, eufemisme ini dapat mengaburkan makna sehingga makna semula tidak terwakili lagi oleh bentuk atau konsep yang menggantikannya. Pergeseran makna ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat pemakai bahasa.¹³

Tujuan awal eufemisme adalah untuk bersopan santun. Namun, di balik semua itu ada hal-hal yang keluar dari tujuan semula. Kadang-kadang, ada bagian eufemisme yang penggunaannya sudah berlebihan sehingga apa yang ingin disampaikan tidak dapat tertangkap secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eufemisme adalah sopan santun yang menipu.¹⁴ Berikut ini beberapa data yang melukiskan penghalusan bahasa atau eufemisme.

No	Tuturan Langsung	Tuturan Tidak Langsung/Eufemisme
1.	Kelaparan	Kekurangan pangan
2.	Rakyat miskin	Masyarakat prasejahtera
3.	Keluarga miskin	keluarga prasejahtera
4.	Pelacur	Wanita tuna susila
5.	Pelacur	Pekerja seks komersial

Frase *kekurangan pangan* pada data (4) merupakan bentuk penghalusan bahasa dari kata *kelaparan*. Karena penggunaannya berlebihan, eufemisme ini menimbulkan makna atau konsep lain terhadap pembaca. Konsep lain ini muncul karena adanya pergeseran makna dari makna sebelumnya. Akhirnya, masyarakat pembaca menganggap hal ini sebuah kewajaran dan tidak menimbulkan rasa prihatin terhadap korban kelaparan yang dimaksud.

Dulu, pemerintah merasa riskan untuk mengatakan *rakyat miskin* sebagaimana data (5). Mereka lalu cenderung menggantinya dengan frasa *masyarakat prasejahtera* (6). Akhirnya, dampak yang dirasakan melalui penggunaan eufemisme ini adalah negara Indonesia terkesan tidak memiliki rakyat miskin karena dunia telah terbohongi oleh sebuah bahasa.

Namun demikian, semua itu terhapus setelah bangsa Indonesia memasuki orde reformasi. *Rakyat miskin* atau *keluarga miskin* justru menjadi predikat rebutan bagi setiap masyarakat karena

¹³ Ibid, p. 25

¹⁴ <http://bahasa.kompasiana.com/2011/07/04/eufemisme-sopan-santun-yang-menipu/>, diunduh pada tanggal 1 April 2012

siapa pun yang tergolong di dalamnya pasti akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Sekarang, banyak yang mengaku sebagai keluarga miskin. Frase *keluarga prasejahtera* kini telah tergantikan menjadi *keluarga miskin* atau diakronimkan menjadi *gakin*.

Lain halnya dengan istilah *wanita tuna susila* (WTS) dan *pekerja seks komersial* yang merupakan penghalusan dari kata *pelacur* sebagaimana data (7-8). Kedua kata ini ternyata memunculkan penafsiran yang berbeda. Penggunaan istilah WTS telah memberikan sedikit rasa aman oleh pelakunya karena mereka seakan-akan terlindungi oleh sebuah bahasa, sementara penggunaan kata *pekerja seks* memberikan arti bahwa seakan-akan perbuatan melacur itu diakui sebagai sebuah pekerjaan yang legal. Berikut ini beberapa data mengenai eufemisme yang digunakan elit politik.

No	Tuturan Langsung	Tuturan Langsung/Eufemisme	Tidak
9.	Utang	Bantuan	
10.	Desa miskin	Desa terpencil	
11.	Bencana alam	Daerah rawan pangan	
12.	Pemotongan upah	Penyesuaian gaji	
13.	Pemecatan	Perampangan	
		Pemutusan hubungan kerja	
		Recall	
14.	Penjara	14a. Lembaga Pemasyarakatan	
		14b. hotel prodeo	
15.	Pencuri kayu hutan	Perambah kayu	
16.	Petugas kebersihan	Cleaning Servis	
17.	Pelayan, pembantu, babu	Office Boy	
18.	Makelar	Broker	
19.	Penagih utang	Debt Collector	
20.	Pengawal	Body Guard	
21.	Pengangguran	Tunakarya	
22.	Sakit	Kurang enak badan	

Dalam kamus elit politik, bangsa ini tidak pernah mengenal *utang*, dan yang ada hanyalah *bantuan* sebagaimana (9). Dari zaman IGGI hingga CGI dan IMF, sejak era orde baru sampai masa reformasi, pejabat Indonesia seperti gatal telinga mendengar istilah

utang. Ini karena mereka tidak hanya mengenal istilah utang, tetapi bantuan.

Jika demikian, apakah artinya hiruk-pikuk kaum buruh yang berdemonstrasi menuntut kenaikan upah dan mencegah pemecatan. Kaum tani hidup dalam kemiskinan, lahan banjir atau kekeringan sehingga kelaparan. Anak jalanan dan gelandangan bertebaran di lorong-lorong kumuh. Pengangguran tidak terhitung, Pecandu narkoba tidak teraba, hingga kejahatan menjadi makanan biasa. Ini karena orang Indonesia, terutama para pejabatnya tidak mengenal kemiskinan. Mereka tidak mengenal istilah kegagalan panen atau bencana alam. Di Indonesia, tidak ada *desa miskin* (10), dan yang ada hanyalah *desa terpencil*. Bencana alam yang menimbulkan kelaparan bisa dirubah dengan istilah keren, yaitu *daerah rawan pangan* (11).

Hal ini tidak jauh berbeda dengan kaum buruh. Gaji dipotong dan bahkan setiap saat terancam pemecatan. Birokrat Indonesia itu tidak mengenal *pemotongan upah* dan tidak tahu istilah *pemecatan*. Yang ada hanyalah *penyesuaian gaji* (12) dan *pemutusan hubungan kerja* (13). Tidaklah mengherankan jika orang jahat dan musuh masyarakat pun mendapat tempat "terhormat". Karena gejala eufemisme, para penjahat dan koruptor kelas kakap yang menjadi musuh dan sampah masyarakat malah ditempatkan di hotel prodeo. Bagaimana bisa para penjahat menginap di hotel setelah terbit keputusan hakim berkekuatan tetap. Hal ini karena kita enggan menyebut penjara atau terali besi. Kata penjara sebelumnya sudah dihaluskan menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana (14a). Tetapi karena merasa kurang halus, kata ini dilembutkan menjadi hotel prodeo sebagaimana (14b). Frase *pencuri kayu hutan* diubah menjadi perambah hutan seperti data (15). Frase *petugas kebersihan* diubah menjadi *cleaning service* seperti data (16). Kata *pelayan, pembantu, babu* diubah menjadi *office boy* sebagaimana data (17). *Makelar* diubah menjadi *broker* sebagaimana data (18). *Penagih utang* saja sudah dihaluskan menjadi *debt collector* sebagaimana data (19). *Pengawal* disebut *bodyguard* seperti data (20). Pengangguran disebut dengan istilah tunakarya (21). Jika bercengkerama dan mendapati pejabat sakit, Anda dianggap tidak sopan kalau bertanya, "Bapak sakit?". Lebih halus dan terasa lebih sopan jika dikatakan, "Bapak kurang enak badan?" Jadi, kata sakit diubah menjadi kurang enak badan untuk memperhalus tutur bahasa seperti data (22).

2 Sarkasme

Secara etimologis, sarkasme berasal dari perancis yang bahasa latinnya sarcasmus asal katanya sarkasmos atau sarkazo. Arti dari sarkazo itu sendiri adalah daging yang tertusuk atau hati yang tertusuk. Jadi sarkazo itu adalah sesuatu yang diujamkan dan menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Dalam perkembangannya kata sarkazo lebih dikenal dengan kata sarx-sarkos yang artinya menyindir dengan tajam atau sindiran yang tajam.

Dalam penggunaan dewasa ini, kata itu lebih dikenal dengan kata *sarcasm* atau sarkasme. Sarkasme adalah pengucapan yang dilakukan secara amat kasar yang diduga akan menyakiti hati orang lain. Sarkasme adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk pengucapan kata-kata yang pahit dan kasar. Penggunaan kata-kata ini untuk mengejek, cemooh atau menyindir yang diduga akan menyakiti hati orang lain dan hal ini melanggar kesantunan dalam berbahasa. Sarkasme adalah penggunaan kata-kata yang diduga melanggar kaidah-kaidah kesantunan berbahasa sehingga menimbulkan efek emosi tertentu, misalnya terhina, sakit hati, tidak enak, marah, dan lain-lain. Selain melanggar kesantunan berbahasa, sarkasme dapat terjadi karena pilihan kata atau diksi yang sangat kasar, juga karena dapat mengancam muka atau membuat malu mitra tuturnya.

Kita dapat memperhatikan model komunikasi para elit politik, terutama anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus yang bertugas membongkar skandal Bank Century. Ungkapan-ungkapan *kau tak mampu, kau tak punya pengetahuan, profesor kok seperti itu*, bahkan kata *bangsat* pun muncul dalam sidang-sidang Pansus. Yang mengherankan, mereka tidak merasa bahwa kata dan kalimat yang mereka produksi tidak pantas diucapkan oleh para anggota DPR terhormat yang *notabene* adalah pilihan rakyat. Begitu parahnya model berbahasa para elit tersebut sampai menggeser substansi skandal Bank Century yang menghebohkan. Tidak sedikit orang mempermasalahkan cara berkomunikasi para elit anggota Pansus ketimbang mempermasalahkan hilangnya uang Rp 6, 7 trilyun.

Perilaku berbahasa demikian mengingatkan kita pada model komunikasi politik para elit politik kita di era kepresidenan Abdurrahman Wahid (alias Gus Dur). *Setting* nya hampir sama dengan setting politik saat ini. Tempat kejadiannya juga sama, yakni Gedung DPR. Pelakukanya juga sama, yakni anggota DPR. Saat itu, kalimat-kalimat kasar bahkan vulgar juga terucap oleh para anggota DPR ketika sedang membongkar kasus Buloggate dan Bruneigate yang mengantarkan kejatuhan Gus Dur. Perbedaannya adalah jika

perilaku berbahasa elit saat itu dimulai dari Gus Dur sendiri, sedangkan perilaku berbahasa elit saat ini dimulai dari mereka sendiri. Kita tentu masih ingat bagaimana Gus Dur dengan mudah mengatakan *DPR* itu sama dengan *taman kanak-kanak*, anggota DPR banyak bertitel MA, *maling*.

Titel MA yang dimaksud bukanlah kepanjangan dari Master of Arts, tetapi *maling* dan *taman kanak-kanak* membuat para anggota DPR marah besar karena kata-kata tersebut dianggap melecehkan martabat anggota DPR dan dianggap tidak sopan. Tidak kalah kasarnya, para anggota DPR membalas pernyataan Gus Dur dengan mengatakan, Presiden *jangan petantang-petenteng* dalam memberikan keterangan, Gus Dur itu *esuk dele, sore tempe*, Presiden telah melakukan *kebohongan publik*, *saraf* Presiden ada yang *rusak*, Presiden omongannya *nglantur* terus.

Bahasa sarkasme para anggota DPR yang jauh dari kesan kesopanan terletak pada kata *petantang-petenteng*, *esuk dele sore tempe*, *kebohongan publik*, *saraf ada yang rusak*, dan *ngelantur*. Kata-kata sarkasme semacam contoh di atas tidak pantas digunakan oleh para anggota DPR yang notabene wakil rakyat yang menguasai segudang etika kesopanan. Atas ulah berbahasa para anggota DPR, Gus Dur merespons dengan mengatakan “*Kalau kalangan DPR merasa tersinggung atas omongan saya itu, ya sudah saya minta maaf. Begitu saja kok repot.*” Klausa terakhir itu kemudian menjadi *joke* khasnya. Karena kejadian itulah mengapa Presiden SBY meminta para anggota DPR, khususnya yang tergabung dalam Pansus, untuk berkomunikasi dengan mengedepankan etika.

Tampaknya, vulgarisme berbahasa elit politik berimbas pada masyarakat umum. Kita dapat menyaksikan lewat media bagaimana para pendemo kasus Bank Century membawa kerbau untuk menyatakan kejengkelannya secara simbolik kepada para pejabat negara yang diduga terlibat kasus Bank Century. Setelah polisi melarang pendemo tidak boleh membawa kerbau, di hari lain pendemo menggantinya dengan kambing. Gambar Presiden dan Wakil Presiden Boediono diinjak-injak dan dibakar, dan gambar Sri Mulyani diberi taring.¹⁵ Bukan hanya itu, para pendemo juga melakukan hal-hal yang tidak wajar. Mereka membakar pos polisi dan kendaraan berplat merah, merusak pagar masuk halaman gedung DPR RI

¹⁵ Rahardjo, Mudjia, 2010, *Sekilas Bahasa Elit Politik Kita*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/97-sekilas-bahasa-elit-politik-kita.html>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2012.

ketika menginginkan harga bahan bakar minyak atau BBM tidak dinaikkan tanggal 1 April 2012.

Mencermati komunikasi politik para elit dan cara orang menyampaikan pendapat melalui demo yang demikian jauh dari etika kesantunan, Presiden SBY segera menghimbau kepada masyarakat, terutama para elit politik, untuk mengedepankan etika dalam berkomunikasi dan berpolitik. Himbauan Presiden tidak berlebihan. Sebab, dari perspektif sosiolinguistik, ilmu bahasa yang khusus mengkaji penggunaan bahasa dari aspek sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan, model komunikasi politik para elit dan masyarakat kita tersebut jauh dari pakem kesantunan berbahasa.

Harus dipahami oleh setiap pengguna bahasa bahwa berbahasa tidak saja bermaksud menyampaikan pesan, tetapi juga membangun harmoni sosial. Keduanya harus terpenuhi. Dalam konteks ini ungkapan “yang penting maksud tercapai”, tentu tidak relevan. Karena itu, apa yang diucapkan oleh para anggota DPR jelas tidak memenuhi syarat fungsi berbahasa. Sebab, yang terjadi kemudian bukan harmoni sosial di antara sesama anggota Pansus DPR, melainkan justru konflik.

Jika demikian, maka ungkapan para anggota DPR, terutama yang tergabung dalam Pansus Bank Century jelas jauh dari kaidah kesantunan berbahasa. Label sosial yang dimiliki seseorang (gelar, status, jabatan, agama, usia, tingkat pendidikan, dan sebagainya) semua bisa disembunyikan dengan rapat, tetapi tidak cara berbahasanya. Cara berbahasa kita menggambarkan dengan jelas siapa kita sesungguhnya. Begitu juga anggota DPR yang terhormat.

D. Bahasa Elit Politik Sebagai Sebuah Refleksi Budaya

Dalil “*bahasa menunjukkan bangsa*” yang selama ini berkembang tidak lagi relevan. Sebab, bahasa kaum elit politik dan terpelajar tidak jauh berbeda dengan bahasa rakyat jelata. Keduanya sama-sama menggunakan bahasa kasar atau bahasa sarkasme yang jauh dari etika kesopanan. Kalaupun mempunyai kepentingan, kaum elit yang notabene menjabat sebagai anggota DPR menggunakan bahasa eufemisme sebagai salah satu cara mengelabui masyarakat. Mereka menggunakan bahasa halus yang tampak sangat sopan, padahal penuh dengan penipuan.

Kita dapat melihat dialog para elit politik di media cetak dan elektronik. Jika dicermati dengan seksama, penggunaan bahasa sarkasme merefleksikan kemiskinan berbahasa mereka. Padahal sudah diketahui bersama bahwa semakin tinggi status sosial seseorang

harusnya diikuti dengan semakin kaya dan santunnya dalam berbahasa. Tidak sebaliknya, mengumbar kata-kata jorok, vulgar, kasar, dan jauh dari etika kesopanan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para elit politik menggunakan bahasa sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Mereka menggunakan bahasa eufemisme jika hendak meraih dan mendapatkan simpatik konstituen pemilihnya atau rakyat tempat mereka mendapatkan suara. Sebaliknya, mereka akan menggunakan bahasa sarkasme kepada siapapun atau pihak manapun yang menjadi lawan politiknya.

Jika tidak segera diatasi, untuk menjadi bangsa yang berkarakter kuat sungguh jauh dari harapan. Sebab, pemilihan kata yang tepat dan kalimat yang logis memancarkan karakter penuturnya yang kuat, dan itu mampu mempengaruhi para pembaca dan pendengarnya. Banyak peristiwa sejarah berawal dari pemilihan kata dan susunan kalimat yang tepat yang dapat menggerakkan dan menggetarkan denyut masyarakat untuk melawan kezaliman, seperti Bung Tomo dan Bung Karno.¹⁶

Bung Tomo mengusir tentara sekutu yang mencoba masuk lagi untuk menjajah Indonesia dengan pekikan kata "*Allahu Akbar*", yang mampu membakar semangat warga Surabaya untuk melakukan perlawanan. Bung Karno juga melakukan hal yang sama dengan memilih kata "*Mati atau Merdeka*" sebagai pekik perjuangan yang mampu mengantarkan kemerdekaan Indonesia yang saat ini kita nikmati bersama. Kalau begitu, para pendiri negara ini sungguh orang-orang hebat dengan karakter yang kuat yang ditunjukkan lewat pemilihan kata yang tepat dalam perjuangannya. Kendati saat itu mereka masih miskin harta, tetapi sudah memiliki kekayaan kata dan itu jauh lebih tinggi nilai kemanusiaannya. Karena itu, kepada mereka kita patut berbangga dan berterimakasih. Kepada mereka pula seharusnya kita mau belajar bagaimana agar tidak menjadi bangsa yang miskin kata dalam berbahasa.

E. Penutup

Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Namun di tangan manusia, bahasa bukan sekedar alat untuk berkomunikasi tapi dapat pula dimanipulasi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingannya.

¹⁶ Anton, 2011, *Belanda Menjajah dengan Politik Bahasa*, <http://antondjakarta.blogspot.com/2011/10/belanda-menjajah-dengan-politik-bahasa.html>

Dalam dunia politik, bahasa dibatasi sebagai alat untuk mengekspresikan kekuasaan. Bahasa digunakan sebagai alat pemikat diri dan penarik simpatik sehingga sarat dengan eufemisme, jargon dan retorika. Penggunaan gaya bahasa eufemisme dimaksudkan untuk membuat segala sesuatu menjadi tampak berkesan positif, berkesan lebih baik dibanding realitasnya.

Selain bahasa eufemisme, terdapat pula bahasa sarkasme. Bahasa sarkasme ini digunakan seorang politisi ketika berkomunikasi dengan lawan politiknya. Modusnya bermacam-macam. Terkadang, bahasa ini digunakan untuk mengejek, mengumpat, meneror, dan mengancam muka lawan politiknya.

Penggunaan bahasa eufemisme dan sarkasme itu sebenarnya dapat menunjukkan budaya penuturnya. Orang-orang yang menggunakan bahasa sarkasme sudah pasti tergolong orang yang miskin bahasa. Dikatakan demikian karena semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi pangkat dan jabatannya, harusnya diikuti dengan semakin kaya dan santunnya dalam berbahasa. Tidak sebaliknya. Semakin tinggi jabatan dan pangkat, semakin tinggi status sosial seseorang, semakin miskin dan kurang santun dalam berbahasa. Jika hal itu terjadi, tidak ada bedanya para elit politik dengan para kuli bangunan, para preman jalanan yang juga menggunakan bahasa sarkasme. Wallahu A'lam.

Daftar Pustaka

- Anton, 2011, *Belanda Menjajah dengan Politik Bahasa*, <http://antondjakarta.blogspot.com>.
- Hasanuddin, WS, Mendekatkan Masyarakat dengan Bahasanya, <http://padang today.com>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2012.
- <http://bahasa.kompasiana.com/2011/07/04/eufemisme-sopan-santun-yang-menipu/>, diunduh pada tanggal 1 April 2012.
- Jatmiko, Teguh, 1995, "*Penyair Harap Minggir*" Jawa Pos, 29 Oktober.
- Linda, S, Sitonga, 2012, "Harga BBM: SBY Ingatkan Ada Konsekuensi dari Keputusan DPR," *Kompas*, 1 April 2012.
- Rahardi, Kunjana, 2010, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Rahardjo, Mudjia, 2010, *Bahasa dan Kekuasaan*, <http://mudjiarahardjo.com>, diunduh tanggal 25 Maret 2012.

- Rahardjo, Mudjia, 2010, *Sekilas Bahasa Elit Politik Kita*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/97-sekilas-bahasa-elit-politik-kita.html>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2012.
- Santoso, Anang, 2003, *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*, penerbit Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
- Sultan, 2009, *Bahasa Pencitraan dalam Wacana Iklan Kampanye Calon Anggota Legislatif 2009*, Jurnal Wacana Kritis, Vol. 14, No. 2 Juli.
- Trianto, Agus, 2008, *Telaah Sarkasme Judul Berita Surat Kabar*, Makalah Disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa Indonesia di Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008.
- Webster's World Encyclopedia. 2000. Program CD.
- www.tubasmedia.com/berita/yusril-pasal-7-ayat-6a-tabrak-uud-45/. Diunduh pada tanggal 1 April 2012.